

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Adami, Chazawi. 2019. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia* : Depok: Raja Grafindo Persada
- Danil Elwil. H, 2016. *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasanya* (Jakarta : Rajawali Press Grafindo)
- Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2010)
- Hasil Eksaminasi Putusan PK Perkara Sudjiono Timan dan Bunga Ramapai Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, 2017(Depok : Rajawali Pers)
- Hamzah Andi, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya* (Jakarta : Softmedia, 2012)
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Liberty : Yogyakarta, 2005)
- Nawawi H. Zaidan *Manajemen Pemerintahan* (Depok : Rajawali Pers 2019, cet.3)
- Nuswardani Nunuk, SH; MH, 2021, *Sistem Pemerintahan Indonesia Konsep dan Praksis Penyelenggaraanya* (Malang Jatim : Penerbit Setara Press,)
- Panggabean H.P.,SH, M.S, 2020, *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia* (Jakarta : BIP)
- Santoso Agus Aris Prio ,SH;MH,dkk, 2022. *Tindak Pidana Korupsi* (Yogyakarta : Pustaka Baru Press)
- Satria Hariaman, 2022, *Hukum Pidana Khusus* (Depok : Grafindo Persada)
- Sibuea P. Hotma, SH; MH, 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Asas asas Umum Pemerintahan yang Baik* (Jakarta :Erlangga)

Sibuea P. Hotma, S.H; M.H. dan Wijanarko Seno Dwi, S.H;M.H, 2020 *Dinamika Negara Hukum* (Depok : Rajawali Press)

Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, 2009, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press.

Suhartoyo, 2019, *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Metode Prioritas dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pencucian Uang* (Depok :Rajawali Pers)

Suteki dan Taufani Galang, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat Teori dan Praktik* (Depok : Rajawali Press)

Thomas Tokan Pureklolon, 2020, *Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik* (Yogyakarta : Kanisius)

Yanto Oksidelfa, 2020, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung : Pustaka Reka Cipta)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang *Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN*

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi juncto Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 *tentang Pengesahan United Nations Conventions Against Corruption*

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS

Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS

Surat Ederan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Jurnal

Ahmad Suryono, *Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Progresif Sebagai Tindakan Pencegahan Korupsi*, Jurnal Peran Perguruan Tinggi dalam Upaya Penanggulangan Korups Vol.5

Dwi Harmono, Kadi Sukarna, Diah Sulistyani, Muhammad Junaidi, *Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara*, Jurnal USM Law Review Vol 3 No 2 Tahun 2020

Indah Sari, *Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern (Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 9 No. 1, September 2018)*

Miracle M.A.A S.Sihombing *Artikel Ilmiah berjudul Urgensi Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2013*

Tomi Hadi Moelyono, Maria Rosalind, Maria Resta Erlina Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika, Surabaya, Indonesia, *E-LHKPN dan Perampasan Aset Sebagai Instrumen Pencegahan Peningkatan Kekayaan Yang Tidak Sah*, LEX LIBRUM : JURNAL ILMU HUKUM

Volume 8 Nomor 1 Desember 2021

Zulkarnain Ridwan, *Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat (Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No.2 Mei-Agustus 2012, ISSN 1978-5186)*

Yuniarty Veronika Ingnuan dan Mohamad Lutfi STIE Muhammadiyah Jakarta (JURNAL EKOBIS, Ekonomi Bisnis & Manajemen ISSN: 2088-219X, Volume II, Nomor 6, September 2018)

Internet

Alfian Putra Abdi; <https://tirto.id/kpk.15649-penyelenggara-belum-laporkan-harta-kekayaan-gqXi> <https://nasional.sindonews.com/berita/1395096/14/tidak-lapor-harta-kekayaan-pejabat-teran-cam-sanksi>.

Arhiem, *Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara*(online), http://hukumperbankan.blogspot.com/2009/07/laporan-harta-kekayaan-penyelenggara_24.html (Kamis, 23 Agustus 2012 pukul 21.03)

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3027-seputar-disiplin-pegawai-negeri>

Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, <https://www.pn-gunungsitoli.go.id>

Hukum dan Perbankan Online : Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) (hukumperbankan.blogspot.com)

<https://pa-lubuksikapin.go.id/transparansi-laporan-publikasi/lhkpn-lhkpn-dan-lhkasn>

<https://www.ptun-tanjungpinang.go.id/layanan-publik/laporan/lhkpn-lhkasn>

Reza Syawawi Peneliti Hukum dan Kebijakan Transparency International Indonesia, Sumber: <https://mediaindonesia.com/opini/4013/laporan-harta-kekayaan-penyelenggara-negara>, Jumat 05 Juni 2015, 00:00 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_Harta_Kekayaan_Penyelenggara_Negara.

hukumonline.com:17-08-2012

Prayogi Dwi Sulisyo; <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/09/07/95-persen-lhkpn-tidak-akurat>